

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini, kehidupan ekonomi manusia tidak dapat terlepas dari peran lembaga keuangan dan perbankan. Lembaga perbankan merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran yang akan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan produktif sehingga kegiatan perekonomian dapat terwujud (Faradila dan Cahyati, 2013). Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Darmawi (2012) dalam Sari dan Astuti (2015) menyatakan bahwa bank tidak hanya berperan untuk menyediakan berbagai jasa perbankan dan sebagai pusat perekonomian tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah. Pada saat terjadi kekacauan dalam dunia perbankan maka kegiatan perekonomian juga akan menjadi bermasalah. Oleh karena itu, bank dituntut harus sehat dan menghasilkan keuntungan agar dapat berkembang dan tumbuh kuat, selain dituntut untuk bisa menjalankan perannya dengan baik, bank juga harus bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat, karena modal utama bank adalah kepercayaan dari nasabah. Dalam perusahaan perbankan tingkat kesehatan bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.02/2016 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

Sifat industri perbankan berbeda dengan sifat industri perusahaan yang lain, hal ini disebabkan karena jumlah pihak yang berkepentingan dengan bank cenderung lebih banyak. Agar dapat bertahan dan tetap kompetitif, bank harus dapat memainkan orientasi baru. Menurut Mahsyud Ali (2006) dalam Sochib (2016) pertama, bank harus melakukan diversifikasi atas *exposure portofolionya* sesuai dengan resiko dan tantangan yang dihadapinya. Kedua, bank harus melakukan *continous innovation* dalam mengendalikan bisnis perbankan dengan disesuaikan resiko-resiko yang terkait di dalamnya. Dari berbagai perubahan yang terjadi menegaskan bahwa peningkatan kualitas manajemen perbankan sangat diperlukan, agar tercapai aspek keamanan dan stabilitas pada industri perbankan.

Manajemen laba pernah dilakukan oleh perusahaan Toshiba pada tahun 2015 yang menyatakan hasil pemeriksaannya bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam penggelembungan laba usaha perusahaan sebesar ¥ 151,8 Miliar (setara dengan 15,85 triliun rupiah) sejak tahun 2008, akibatnya saham Toshiba turun sekitar 20% ketika isu ini terungkap. Nilai pasar perusahaan hilang sekitar ¥ 1,67 Triliun (setara dengan 15,85 triliun rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba menyebabkan turunnya kepercayaan investor kepada perusahaan.

Di Indonesia pernah terjadi praktik manajemen laba yang melibatkan salah satu perusahaan perbankan, yaitu kasus Bank Century pada tahun 2009. Diketahui bahwa pemilik dan pejabat bank melakukan penyalahgunaan dana nasabah. Pada 30 September 2009 beredar laporan awal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century bahwa laporan tersebut mengungkapkan adanya kejangalan dibalik penyelamatan Bank Century ada dugaan pelanggaran kebijakan

dalam pemberian bantuan kepada Bank Century. Akhirnya pada November 2009, 139 anggota DPR dan 8 Fraksi mengusulkan hak angket atas pengusutan Bank Century. Dalam proses hukum pemilik dan pejabat Bank Century ditetapkan sebagai terdakwa kasus penggelapan dana Nasabah.

Teori keagenan menjadi alasan utama tindakan manajemen laba, teori keagenan muncul karena adanya konflik perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, manajer sebagai pengelola berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.

Asih dan Gundono (2000) dalam Dahayani (2017) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan prinsip akuntansi umum yang mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan, sedangkan menurut Schiper (1989) dalam Sochib (2016) manajemen laba merupakan sebuah intervensi yang sengaja dilakukan untuk maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa

keuntungan tertentu. Manajemen laba umumnya dilakukan oleh perusahaan yang tingkat kesehatannya diukur menggunakan laba, menurut Rahmawati (2012) dalam Gumilang, dkk (2015) manajemen laba terjadi akibat masalah keagenan, yaitu tidak bertemunya kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan sehingga kepercayaan investor pun berkurang.

Abdurrahim (2014) menyampaikan beberapa teori yang bisa membuktikan adanya manajemen laba yakni teori yang dikemukakan oleh Kamin *and* Ronen pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh manajer memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan praktik *earnings management* dibanding perusahaan yang dikelola oleh pemilik. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Dahayani (2017) ada 3 faktor pendorong terjadinya manajemen laba yaitu program bonus, peningkatan utang, dan *cost* politik. Achmad (2007) melakukan pengembangan atas penelitian Watts dan Zimmerman (1986) dan menemukan bahwa ada faktor lain yang memotivasi adanya tindakan manajemen laba yaitu kebijakan deviden. Kebijakan deviden menjadi salah satu alasan pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba dalam bentuk *income decreasing*.

Kebijakan deviden menjadi sumber konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, dimana pemegang saham lebih menyukai deviden yang dibagikan dalam jumlah yang lebih besar sedangkan manajemen kurang suka membagikan deviden dan lebih suka menginvestasikan sebagai laba ditahan dan tambahan modal di tahun berikutnya. Agen dan prinsipal akan berusaha untuk

memaksimalkan kesejahteraan masing-masing, oleh karena itu untuk mencapai tujuannya pihak manajemen berinisiatif untuk melakukan pengelolaan laba untuk memperkecil laba yang dilaporkan.

Menurut Dahayani (2017) kebijakan deviden merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan sebagai tambahan modal. Lease, *et. al.* (2000) dalam Gumanti (2013) mengemukakan bahwa Kebijakan dividen adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen dalam membuat keputusan pembayaran dividen, yang mencakup besaran rupiah, pola distribusi kas kepada pemegang saham. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan deviden adalah pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah laba yang akan dibayarkan kepada investor dan ditanam kembali sebagai pembiayaan investasi di masa datang. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diproksikan dengan *Dividend Payout Ratio* (DPR). Hasil penelitian Savov (2006), Putri (2012) serta penelitian Mahdi dan Sasan (2012) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan pada manajemen laba. Yang berarti bahwa semakin tinggi dividend payout ratio maka manajemen akan semakin melakukan manajemen laba dalam bentuk *income decreasing*.

Saat ini, hampir setiap perusahaan mulai menerapkan adanya pemisahan kerja antara pemegang saham dengan manajemen yang biasa disebut dengan teori agensi, dimana manajemen sebagai pengelola yang menangani perusahaan secara langsung diyakini lebih mengetahui informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Menurut Afinindy (2017) Teori Agensi adalah konflik

yang terjadi antara pemegang saham dan pihak manajer yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Menurut Dwi dan Budiasih (2018) teori agensi adalah hubungan kontrak antara pemegang saham dan pihak manajemen, dimana dalam menjalankan perusahaannya pemegang saham mendelegasikan manajemen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah konflik yang terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham yang dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dalam menjalankan perusahaan.

Herawaty (2008) mengemukakan bahwa Teori keagenan menjelaskan masalah manajemen laba dapat diminimumkan dengan pengawasan sendiri melalui *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholders* dan *shareholders*. Menurut Penelitian Nurmansyah, dkk (2019) penerapan *Good corporate Governance* berpengaruh terhadap manajemen laba. Kebutuhan untuk menerapkan *corporate governance* adalah bagian terpenting dalam perusahaan perbankan. Dalam penelitian ini indikator *corporate governance* diprosikan dengan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah bagian dari perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik). Karena dalam sebuah perusahaan diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh

dewan komisaris, dengan tujuan untuk menggunakan waktu yang efisien dan memanfaatkan keahlian individu masing-masing direktornya.

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba karena proporsi dewan komisaris dalam perusahaan mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi didalam perusahaan. Rahmawati (2013) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba karena peranan dewan komisaris independen dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan telah memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat membatasi manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat diasumsikan bahwa tingkat dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan sangat penting dan berpengaruh dalam meminimalisir manajemen laba di dalam perusahaan.

Boediono (2005) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme dari *good corporate governance*. Struktur kepemilikan merupakan cerminan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan yang dapat dibagi menjadi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah

dan kepemilikan keluarga. Dalam perusahaan perbankan struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Utama (2015) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham dalam industri perbankan oleh manajemen atau manajemen sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan. Menurut Kusumawardhani (2012) dalam Sari dan Astuti (2015) presentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajer cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba, dengan meningkatkan kepemilikan manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal* dan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan manajerial karena kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan dan kemungkinan besar akan berhasil untuk menekan upaya manajemen laba oleh pihak manajemen.

Selain penerapan *Corporate Governance* yang diproksikan dengan komposisi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial, perusahaan memerlukan jasa seorang akuntan publik yang biasa disebut sebagai auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, auditor berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Selama ini kualitas audit biasanya dikaitkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditugaskan untuk melakukan audit. Dalam hubungannya Kantor Akuntan Publik (KAP) akan bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam menjaga reputasinya, sedangkan pihak manajemen ingin mendapatkan tingkat akuntabilitas yang tinggi atas kinerja keuangannya dari hasil audit KAP yang berkualitas.

Auditor menerima biaya audit sebagai imbalan atas jasa profesional yang mereka berikan kepada perusahaan. Biaya audit adalah biaya yang harus ditanggung klien karena telah mendapatkan jasa audit dari sebuah KAP. Biaya audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Besarnya biaya dapat bervariasi tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Auditor yang mampu memberikan kualitas yang lebih baik seharusnya menerima bayaran yang lebih tinggi sebagai imbalan. Tetapi dalam kenyataannya justru biaya audit yang lebih tinggi membuat bias antara hubungan auditor dengan klien. Hal ini membuat auditor cenderung tidak independen ketika mendeteksi manajemen laba. Hal inilah yang membuat pertanyaan apakah mungkin *fee* audit mampu mempengaruhi hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2018) dengan judul Pengaruh ukuran perusahaan, pajak penghasilan, *good corporate governance*, dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan yang mendapat skor CGPI yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen yang digunakan. Penulis menggunakan variabel kebijakan dividen, dewan komisaris independen, biaya audit, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. selain asimetri informasi. Selain itu, penulis menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 sebagai objek penelitian.

Penelitian ini memilih perusahaan perbankan sebagai objek penelitian dikarenakan berbagai alasan. Pertama, perusahaan perbankan merupakan bagian dari perusahaan yang terdaftar di BEI dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak yaitu kurang lebih 40 perusahaan dibandingkan dengan kategori perusahaan lain. Kedua, data *Annual Report* yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan data yang paling lengkap diantara perusahaan lain. Selain itu, periode 2014-2018 dipilih karena periode ini merupakan tahun terkini yang memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian terkait ketersediaan dan kelengkapan data penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Deviden, Dewan Komisaris Independen, Biaya Audit, Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Periode Tahun 2014-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel kebijakan deviden berpengaruh terhadap variabel manajemen laba?

2. Apakah variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap variabel manajemen laba?
3. Apakah variabel biaya audit berpengaruh terhadap variabel manajemen laba?
4. Apakah variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap variabel manajemen laba?
5. Apakah variabel kebijakan deviden, biaya audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap variabel manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang kebijakan deviden, komisaris independen, biaya audit, kepemilikan manajerial dan manajemen laba. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh variabel kebijakan deviden terhadap variabel manajemen laba.
2. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh variabel dewan komisaris independen terhadap variabel manajemen laba.
3. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh variabel biaya audit terhadap variabel manajemen laba.
4. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap variabel manajemen laba.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel kebijakan deviden, komisaris independen, biaya audit, kepemilikan manajerial terhadap variabel manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam setiap penelitian diharapkan memiliki berbagai manfaat yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan deviden, biaya audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Ilmu pengetahuan dan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bukti empiris mengenai kebijakan deviden, biaya audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial yang mempengaruhi tindakan manajemen laba.

b. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah ilmu dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan deviden, dewan komisaris independen, biaya audit, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

d. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

e. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman agar para manajer tidak melakukan praktik manajemen laba.